

# PEMETAAN AKTIVITAS TRIDARMA PROGRAM STUDI AKUNTANSI UNIVERSITAS ISLAM INDRAGIRI DALAM PENCAPAIAN SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs)

ROSLIANA

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Indragiri

Email: r.rosliana@gmail.com(korespondensi)

Received : 25 Juli 2018 ; Accepted : 30 Juli 2018

## Abstract

Accounting Study Program of Islamic University of Indragiri (UNISI) was founded in 2008 with accreditation B which committed as member of SDGs law pillar and governance working group. The purpose of this research is to view the alignment of SDGs with TRIDAMA activities of Accounting Study Program of Islamic University of Indragiri (UNISI) in order to support the SDGs achievement. SDGs are 17 goals, 169 targets and 241 indicators in social dimension coverage, economic and environment, law and governance. Based on desk review, it can be concluded that the Accounting Study Program of Islamic University of Indragiri (UNISI) could provided the achievement acceleration of 16 goals; peace, justice and the formidable institutional which distributed in 4 indicators of SDGs

Keywords: SDGs, Mapping, goals, targets dan Indicators

## 1. PENDAHULUAN

Program Studi Akuntansi Universitas Islam Indragiri (UNISI) berdiri sejak tahun 2008 dengan status terakreditasi B. Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir melalui Surat Keputusan Bupati nomor kpts.362/VI/HK-2017 tanggal 8 Juni 2017 tentang Pembentukan Tim Koordinasi dan Sekretariat Sustainable Development Goals (SDGs) Kabupaten Indragiri Hilir mengamanahkan Program Studi Akuntansi UNISI ke dalam pilar Hukum dan Tata Kelola. Tujuan kajian ini adalah melihat keselarasan SDGs dengan aktivitas tridarma Program Studi AKuntansi UNISI sehingga mendukung pencapaian SDGs.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1. Definisi SDGs

Pembangunan berkelanjutan sebagai rencana aksi global yang dilaksanakan dalam 15 tahun ke depan memiliki prinsip dasar untuk People, Planet, Prosperity, Peace dan Partnership atau yang dikenal dengan prinsip 5 P. People, memastikan untuk mengakhiri kemiskinan dan kelaparan dalam segala bentuk dan dimensinya serta memastikan seluruh umat manusia dapat memenuhi potensi dan kemampuan mereka secara bermartabat dan setara dalam lingkungan yang sehat. Planet, melindungi planet dari degradasi termasuk pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan, pengelolaan sumber-sumber daya alam secara berkelanjutan dan mengambil tindakan cepat terhadap perubahan iklim

sehingga planet dapat mendukung kebutuhan hidup generasi saat ini dan yang akan datang. Prosperity, memastikan seluruh umat manusia dapat menikmati hidup yang sejahtera dan terpenuhi kebutuhannya, serta kemajuan ekonomi, sosial dan teknologi berlangsung secara harmoni dengan alam. Peace, memelihara masyarakat yang damai, adil dan inklusif yang terbebas dari ketakutan dan kekerasan. Patnership, mengerahkan sarana yang diperlukan untuk pelaksanaan Agenda 2030 melalui kerja sama global untuk pembangunan berkelanjutan yang dilakukan dengan penguatan kerja sama global yang berlandaskan semangat solidaritas global. Untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, ditetapkan pula sarana pelaksanaan (Means of Implementation). SDGs terdiri dari 17 Tujuan dan 169 Target yang tercakup dalam dimensi sosial, ekonomi dan lingkungan secara terintegrasi. Seluruh tujuan tersebut adalah sebagai berikut [1;2;]:

1. Tanpa Kemiskinan
2. Tanpa Kelaparan
3. Kehidupan Sehat dan Sejahtera
4. Pendidikan Berkualitas
5. Kesenjangan Gender
6. Air Bersih dan Sanitasi Layak
7. Energi Bersih dan Terjangkau
8. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi
9. Industri, Inovasi dan Infrastruktur
10. Berkurangnya Kesenjangan
11. Kota dan Permukiman Berkelanjutan

12. Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan
13. Penanganan Perubahan Iklim
14. Ekosistem Lautan
15. Ekosistem Daratan
16. Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh
17. Kemitraan untuk Mencapai Tujuan

## 2.2. Prinsip-prinsip Pelaksanaan SDGs

Beranjak dari pengalaman semua negara melaksanakan MDGs yang pencapaian target-target yang telah ditetapkan tidak optimal, disepakati perlunya penyempurnaan paradigma untuk kelanjutan MDGs menjadi SDGs.

SDGs dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip-prinsip pembangunan yang universal. Maksudnya adalah SDGs dilaksanakan tidak hanya oleh negara berkembang, namun juga oleh negara maju untuk kemajuan seluruh bangsa di dunia. SDGs merupakan kesatuan antara dimensi pembangunan sosial, ekonomi dan lingkungan yang komprehensif serta saling terkait. Kemajuan pada satu dimensi pembangunan memerlukan keterlibatan aktif dari dimensi pembangunan lainnya. SDGs juga merupakan aksi dan katalis global untuk kemitraan internasional dalam pencapaian pembangunan berkelanjutan. SDGs menekankan pentingnya pemenuhan hak azasi manusia dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Pelaksanaannya harus mampu memberi manfaat kepada semua orang, khususnya kelompok rentan dan disabilitas. Prinsip ini dikenal dengan istilah "No One Left Behind" atau "Tidak ada seorangpun yang Tertinggal". Untuk melaksanakan SDGs, Indonesia menjalankan prinsip inklusif dengan melibatkan 4 platform partisipasi yang terdiri atas Pemerintah dan Parlemen, Akademisi dan Pakar, Filantropi dan Pelaku Usaha, Organisasi Masyarakat Sipil dan Media dengan fokus pada kelompok rentan dan kaum disabilitas.

Setiap platform ini memiliki peran masing-masing, namun saling terkait. Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, memiliki peran untuk menetapkan kebijakan dan peraturan, memformulasikan perencanaan dan alokasi anggaran, melaksanakan, memonitor, mengevaluasi dan melaporkan hasil pencapaian. Sementara, fungsi dari Dewan Perwakilan Rakyat adalah untuk mengawasi anggaran, pelaksanaan dan monitoring SDGs. Organisasi masyarakat sipil dan media berperan untuk mendiseminasikan dan melakukan advokasi tentang SDGs, membangun kesadaran masyarakat,

memfasilitasi program dan pelaksanaannya serta turut serta dalam monitoring dan evaluasi. Filantropi dan pelaku usaha, berperan untuk melakukan advokasi di antara para pelaku usaha dan sektor bisnis, memfasilitasi dan melaksanakan program, meningkatkan kapasitas masyarakat, serta memberikan dukungan pendanaan. Peran serta para pakar dan akademisi berpijak pada fungsi utama pendidikan dan berdasar pada Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu mendidik, melakukan riset, dan pengabdian masyarakat.

SDGs tidak hanya mencakup Tujuan dan Target, namun juga Cara Pelaksanaan yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan meliputi kebijakan, pendanaan, teknologi dan peningkatan kapasitas, serta ketersediaan data untuk memastikan tercapainya semua Tujuan. Disamping itu, sumber pembiayaan SDGs tidak hanya bertumpu pada anggaran pemerintah, namun diperluas dengan sumber-sumber dari pihak swasta dan sumber-sumber lain yang tidak mengikat dan sejalan dengan peraturan perundangan yang berlaku. Dengan memperhatikan seluruh prinsip-prinsip pelaksanaan SDGs di atas, Indonesia berketetapan untuk menjadikan SDGs sebagai suatu "gerakan bersama" dalam mencapai masyarakat yang lebih sejahtera.

## 3. METODOLOGI PENELITIAN

Dokumen ini disusun dengan metode Desk Review yaitu cara pengumpulan data dan informasi melalui analisa pada dokumen terkait dengan menginventarisir indikator-indikator SDGs apasaja yang dapat di wujudkan oleh Program Studi Akuntansi Universitas Islam Indragiri melalui Tri Darma Perguruan Tinggi. Dokumen yang dianalisa pada tahap ini yaitu:

1. Dokumen Borang Akreditasi Program Studi Akuntansi Universitas Islam Indragiri tahun 2017;
2. Buku Panduan Akademik Program Studi Akuntansi Universitas Islam Indragiri,
3. Metadata SDGs.
4. RAD SDGs Kab. Inhil 2017-2018 [6].

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan Desk Review yang dilaksanakan, maka indikator-indikator SDGs yang dapat di support perwujudannya oleh Program Studi Akuntansi Universitas Islam Indragiri melalui Tri Darma Perguruan Tinggi adalah sebagai berikut:

1. Indikator 16.5.1.(a) Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK).  
Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) adalah indeks yang mengukur tingkat permisif

masyarakat terhadap perilaku korupsi. Di Indonesia IPAK diukur dengan menggunakan survei yang menilai perilaku anti korupsi termasuk di dalamnya terkait dengan penyuaipan yaitu Survei Perilaku Anti Korupsi (SPAK). Data yang dikumpulkan melalui SPAK mencakup pendapat terhadap kebiasaan di masyarakat dan pengalaman berhubungan dengan pelayanan publik dalam hal perilaku penyuaipan (bribery), pemerasan (extortion) dan nepotisme [3].

Aktivitas tridarma Program Studi Akuntansi yang mendukung pencapaian Indikator 16.5.1(a) Indeks Perilaku Korupsi yaitu:

- a. Pendidikan, materi ini terdapat pada mata kuliah Audit Forensik [4]
- b. Penelitian terkait Kecurangan Akuntansi [5].

2. Indikator 16.6.1.(a) Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah

Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria (a) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan; (b) kecukupan pengungkapan (adequate disclosures); (c) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; dan (d) efektivitas sistem pengendalian intern (SPI) [3].

Aktivitas tridarma Program Studi Akuntansi yang mendukung pencapaian INDIKATOR 16.6.1.(a) Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah

- yaitu:
- a. Pendidikan, materi ini terdapat pada mata kuliah Audit 1 dan Audit 2 [4];
  - b. Penelitian terkait Opini Auditor [5].

3. Indikator 16.6.1.(b) Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah

Berdasarkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014, SAKIP merupakan rangkaian sistemik dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka

pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah [3].

Aktivitas tridarma Program Studi Akuntansi yang mendukung pencapaian INDIKATOR 16.6.1.(b) Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah yaitu:

- a. Pendidikan, materi ini terdapat pada mata kuliah Akuntansi Sektor Publik [4]
  - b. Penelitian terkait Pengawasan Keuangan Daerah dan Anggaran Daerah [5].
4. Indikator 16.10.2.(a) Tersedianya Badan Publik dalam menjalankan kewajiban sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Badan publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri [3].

Berdasarkan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 mengenai Keterbukaan Informasi Publik (KIP), yang dimaksud informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non elektronik [3].

Informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan undang-undang serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik [3].

Aktivitas tridarma Program Studi Akuntansi yang mendukung pencapaian Indikator 16.10.2.(a) Tersedianya Badan Publik dalam menjalankan kewajiban sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yaitu:

- a. Pendidikan, materi ini terdapat pada matakuliah Audit 1, Audit 2 dan Akuntansi Sektor Publik [4];
- b. Penelitian terkait Akuntabilitas Sektor Publik [5].

## 5. KESIMPULAN

SDGs terdiri dari 17 Tujuan dan 169 Target dan 241 Indikator yang tercakup dalam dimensi sosial, ekonomi dan lingkungan serta hukum dan tata kelola pemerintahan. Berdasarkan desk review ini diperoleh informasi bahwa Program Studi Akuntansi Universitas Islam Indragiri dapat membantu percepatan pencapaian Goals 16 yaitu terkait Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh yang tersebar dalam 4 Indikator SDGs.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Roberta Zulfhi Surya, ST., MT yang telah memfasilitasi penulisan makalah ini dan melaksanakan knowledge sharing terkait SDGs
2. Bapak Drs. H. Erwin, SE., M.E., M.Si selaku Ketua Sekretariat SDGs Kabupaten Indragiri Hilir
3. Ibu Tuti Rahmawati, SP., M.KM., M.Med.Sc anggota Sekretariat SDGs Provinsi Riau

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] Bappenas RI, Rencana Aksi Nasional SDGs Republik Indonesia 2016 – 2019 . [Dokumen Negara], 2017
- [2] R.Z. Surya. Keselarasan Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan /Sustainable Development Goals (SDGs) Pada Rencana Pembangunan Kabupaten Indragiri Hilir. Jurnal Selodang Mayang, Vo.I 10, No. 1, 2018
- [3] UNDP, Metadata SDGs, 2017
- [4] Prodi Akuntansi UNISI, Buku Panduan Akademik, Rencana Strategis Program Studi Akuntansi Universitas Islam Indragiri, [Dokumen Institusi], 2017
- [5] Prodi Akuntansi UNISI, Borang Akreditasi Program Studi Akuntansi Universitas Islam Indragiri [Dokumen Institusi], 2017
- [6] Bappeda Inhil, Rencana Aksi Daerah SDGs Kab. Inhil 2017 – 2018 (support by UNDP). [Dokumen Daerah], 2017